



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAYAT
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 210315

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 362.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 761 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJAR , Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJAR , Rp. 105.000.000
3. Tanah Seluas 576 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, Rp. 47.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 166.500.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.484.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 545.084.000

III. HUTANG Rp. 140.518.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 404.565.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.